

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Buku

- Ali, Mohammad Mahrul, and Melisa Fitria Dini. *Transformasi Sistem Pemilihan Presiden Pasca Reformasi: Dinamika Pertanggungjawaban Dan*

- Pemberhentian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekwensi*, 1996.
- Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Makassar: Prenadamedia Group, 2019.
- Gill, Derek. *Defining Regulatory Management Systems*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2016.
- Hadjon, Philipus M. “Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum, Dalam Hukum Administrasi Dan Good Governance.” *Universitas Trisakti* (2012).
- Haryati, Dwi, Mailinda Eka Yuniza, Richo Andi Wibowo, Hendry Julian Noor, Rizky Septiana Widyaningtyas, Ardianto Budi Rahmawan, Virga Dwi Efendi, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Richo Andi Wibowo. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. FH UII Press, 2014.
- . *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers, 2020.
- Lotulung, Paulus Effendie. “Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik” (1994).
- Mahfud, Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta, 2001.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VI. Jakarta: Prenada Media Group,

2010.

Mintzberg, Henry. *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. Prentice-Hall, Inc, 1993.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

———. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.

OECD. *Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence*. Paris: OECD Publishing, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Cetakan Ke-VIII*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Sadiawati, Diana. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi*. Jakarta: Bappenas RI, 2015.

Soeprapto, Maria Farida Indarti. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

———. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius, 2018.

Stout, H.D. *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over Het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. Tjeenk Willink - Zwolle, 1994.

Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah: Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Jurnal

Arion, Tandi, and Retno Saraswati Indarja. “Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2018).

Chandranegara, Ibnu Sina. “Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 435–457.

- Febrian, Ranggi Ade. "Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 1, no. 1 (2015): 41–49.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 133–147.
- Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022).
- Madjid, Mario Agritama S W. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 169–188.
- Meidiana, Meidiana. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 381–408.
- Monterio, Josef Mario. "Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri Yang Menimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial Dan Teori Kewenangan." *Kerta Patrika* 39, no. 2 (2017).
- North, Douglass C. "Institutions." *Journal of Economic Perspective* 5, no. 11 (1991).
- Nurhalizah, Syarifah, Meisia Viona Valensia, and Karina Dwi Maharani. "Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 03 (2022): 409–417.
- Paramadina, Panggih Fadhilla, and M Yasin Al Arif. "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 74–93.
- Parikesit, Rio Admiral. "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi

- Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 450–459.
- Pramono, Budi. “Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.” *Perspektif Hukum* (2017): 101–123.
- Pranata, Made Dhana. “Problematisasi Hukum Tentang Executive Review Di Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9 (2021): 1334.
- Prasetyaningsih, Rahayu. “Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 263–280.
- Prasetyo, Handoyo, and Wicipto Setiadi. “Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 136–150.
- Romli, Lili. “Masalah Reformasi Birokrasi.” *Civil Service Journal* 2, no. 2 November (2008).
- Sanjaya, Dixon, and Daly Erny. “Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan: Perkembangan Pengaturan Dan Peralihan Kewenangan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 205–208.
- Silalahi, Wilma. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66.
- Simatupang, Taufik H. “Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217–229.
- Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146–153.
- Sururi, Ahmad. “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Susanto, Sri Nurhari. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang

- Pemerintahan.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–441.
- Taufik, Ade Irawan. “Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan (Gagasan Sederhana Dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan).” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 283–301.
- Wicaksono, Dian Agung. “Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 60.
- Wijaya, Ahmad. “Mekanisme Koordinasi Dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif.” *Al Ahkam* 15, no. 2 (2019): 69–80.
- Winarno, Nur Basuki. “Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi.” *Laksbang Mediatama, Yogyakarta* (2008).
- Winata, Muhammad Reza, and Ibnu Hakam Musais. “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 303–321.
- Yanto, Andri, and Harry Setya Nugraha. “Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 130–153.
- Zarkasi, A. “Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43257.
- Zuliandri, Muhammad Faishal, and Isharyanto. “Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Res Publica* 5, no. 1 (2021).

Prosiding

- Madril, Oce. “Pembentukan Lembaga Regulasi Nasional Sebagai Upaya Reformasi Regulasi.” In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.

- Salman, Radian. "Penguatan Kelembagaan Dalam Kerangka Reformasi Regulasi." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
- Tjandra, W. Riawan. "Reformasi Regulasi Dalam Penguatan Kelembagaan Yang Terkait Dengan Peraturan Perundang-Undangan." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
- Usfunan, Jimmy Z. "Lembaga Pembentuk Perundang-Undangan Di Luar Kementerian, Efektifkah?" In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
- Widiati, Ekawestri Prajwalita. "Rekonseptualisasi Kewenangan Kelembagaan Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Reformasi Regulasi." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.

Tesis & Disertasi

- Hattu, Hendrik. "Model Undang-Undang Berkarakter Responsif (Studi Tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi Indonesia)." *Disertasi*. Makasar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2010.
- Lutfia, Vivi. "Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri." Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Pambudi, Rilo. "Pembentukan Lembaga Khusus Regulasi Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2023.

Laporan Hasil Penelitian

- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum*. Jakarta, 2023.
<https://polkam.go.id/konten/unggahan/2023/09/Laporan-Final-Tim->

Percepatan-Reformasi_-14-September-2023_1-spasi.pdf.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.

Sadiawati, Diani, Lilly Widayati, Mumtaz Soraya, Purwa Malaysianto, Yustina Handayani Wijayanti, Mohamad Iksan Maolana, Naomi Helena Tambunan, et al. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Tertib*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015.
https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku_Reformasi_Regulasi.pdf.

Naskah Akademik

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta, 2023.

Media Internet

Ali, Muhammad. "HEADLINE: Wacana Pembentukan 40 Kementerian Di Kabinet Prabowo-Gibran, Plus-Minusnya?" *Liputan6.Com*. Last modified 2024. Accessed June 11, 2024.
<https://www.liputan6.com/news/read/5591509/headline-wacana-pembentukan-40-kementerian-di-kabinet-prabowo-gibran-plus-minusnya>.

Antaranews. "Sekneg: Presiden Akan Bentuk Badan Regulasi Nasional." *AntaraNews*. Last modified 2019. Accessed April 14, 2024.
<https://www.antaranews.com/berita/1161448/sekneg-presiden-akan-bentuk-badan-regulasi-nasional>.

Azis, Arasy Pradana A. "Permenkes Dan Permenhub Soal Ojol Kala PSBB, Mana Yang Harus Dipatuhi?" *Hukum Online*. Last modified 2020.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/permenkes-dan-permenhub-soal-ojol-kala-psbb--mana-yang-harus-dipatuhi-lt5e9ea3a951626>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Kepala BPHN: Hindari Ego Sektoral Dan Utamakan Musyawarah Dalam Penyusunan PP Dan Perpres." *Badan*

Pembinaan Hukum Nasional.

Balhaqi, Bari. "Presiden Akan Bentuk Badan Regulasi Nasional." *Harian Ekonomi Neraca*. Jakarta, November 14, 2019. <https://www.neraca.co.id/article/124335/presiden-akan-bentuk-badan-regulasi-nasional>.

BPHN. "Pentingnya Pendekatan Cost and Benefit Analysis Dalam Evaluasi Regulasi." *BPHN.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed April 20, 2024. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020081308482837/pentingnya-pendekatan-cost-and-benefit-analysis-dalam-evaluasi-regulasi>.

CNN Indonesia. "Jokowi Bentuk Badan Regulasi Nasional Dalam Waktu Dekat." *CNN Indonesia*. Last modified 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191113211321-32-448132/jokowi-bentuk-badan-regulasi-nasional-dalam-waktu-dekat>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Hindari Pembentukan Lembaga Baru Dalam Penyusunan RUU." *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi*. Last modified 2017. Accessed March 5, 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/hindari-pembentukan-lembaga-baru-dalam-penyusunan-ruu>.

———. "Tiga Elemen Reformasi Kelembagaan Pemerintah." *Menpan.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed January 6, 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tiga-elemen-reformasi-kelembagaan-pemerintah>.

Kemenko Polhukam. "Buka Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri, Menko Polhukam: Jangan Terjebak Ego Sektoral." *Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan*. Last modified 2022. Accessed April 21, 2024. <https://polkam.go.id/buka-forum-komunikasi-staf-ahli-menteri-menko-polhukam-jangan-terjebak-ego-sektoral/>.

Rahmawati, Dwi. "RUU Kementerian Negara, RUU TNI Dan RUU Polri Disetujui Jadi Inisiatif DPR." *DetikNews*. Last modified 2024. Accessed June 11, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7361243/ruu-kementerian-negara-ruu-tni-dan-ruu-polri-disetujui-jadi-inisiatif-dpr>.

- Rizaty, Monavia Ayu. "Hari Konstitusi, Berapa Jumlah Peraturan Di Indonesia?" *DataIndonesia.Id*. Last modified 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>.
- Sholikin, M. Nur. "Benang Kusut Reformasi Regulasi." *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*. Last modified 2023. <https://pshk.or.id/rr/benang-kusut-reformasi-regulasi/>.
- Taher, Andrian Pratama. "Efektifkah Badan Pusat Legislasi Nasional Ala Jokowi?" *Tirto.Id*. Last modified 2019. Accessed November 12, 2022. <https://tirto.id/efektifkah-badan-pusat-legislasi-nasional-ala-jokowi-deJU>.